

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu target dan tujuan pembangunan ekonomi adalah meningkatkan pendapatan masyarakat dengan cara mengelola kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil dengan melakukan penambahan pengetahuan dan peningkatan ketrampilan melalui proses pembelajaran serta peningkatan penanaman modal (Sukirno, 2006). Apabila pembangunan ekonomi telah berhasil meningkatkan pendapatan dengan menempuh jalan perbaikan pengetahuan dan keterampilan serta dengan peningkatan penanaman modal hal tersebut akan memperbaiki kondisi kesejahteraan masyarakat karena pendapatan perkapita dan indikator kesejahteraan ekonominya telah tercapai dan keduanya merupakan salah satu indikator dari keberhasilan pembangunan ekonomi (Economic Measurement and forecasting, 2010). Namun, jika indikator tersebut tidak tercapai maka kesejahteraan masyarakatpun tidak akan terjadi yang akhirnya pembangunan ekonomi di Negara tersebut tidak berhasil. Pembangunan ekonomi disuatu Negara harus mampu meningkatkan taraf kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Dengan kata lain, jika suatu Negara menginginkan keberhasilan pembangunan ekonomi maka diperlukannya upaya sadar dan terarah dari Negara tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui pemanfaatan sumber daya yang ada baik sumber daya alam yang dimiliki serta sumber daya manusia di Negara tersebut atau dengan usaha-usaha pembangunan baik

yang menyangkut sektoral atau regional yang telah banyak memberikan hasil-hasil yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan ini antara lain dapat diukur dari kenaikan tingkat pendapatan nasional atau laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi setiap tahunnya (Sukirno, 2006).

Salah satu upaya untuk meningkatkan pemerataan pendapatan adalah dengan adanya pelaksanaan pembangunan ekonomi. Suryono menyatakan bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk atau masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Oleh karena itu perlu adanya pelaksanaan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan dan dilakukan dengan baik. Sebab dengan pelaksanaan pembangunan ekonomi akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada meningkatkan pendapatan masyarakat (Suryono, 2000)

Masalah pertama dalam pemerataan distribusi pendapatan adalah terjadinya ketimpangan (ketidakefektifan). Ketimpangan merupakan kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Perbedaan itu timbul karena adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan faktor produksi terutama kepemilikan barang modal (capital stock). Masyarakat yang memiliki faktor produksi yang besar akan memperoleh pendapatan yang lebih besar. Selain itu, perbedaan dalam mengemban pendidikan juga akan mempengaruhi seseorang dalam mendapatkan pendidikannya (Setianegara, 2008, p. 88). Tidak meratanya pendapatan akan mengakibatkan terjadinya ketimpangan yang menjadi cikal bakal munculnya

masalah kemiskinan. Membiarkan kedua masalah tersebut akan semakin memperparah keadaan dan tidak jarang menimbulkan konsekuensi negative terhadap kondisi sosial dan politik. Pendapatan nasional yang tidak merata, tidak akan menciptakan kemakmuran bagi masyarakat secara umum. System distribusi yang tidak pro poor hanya akan menciptakan kemakmuran bagi golongan tertentu saja, sehingga ini menjadi isu sangat penting dalam menyikapi angka kemiskinan hingga saat ini. Di Indonesia kesenjangan pendapatan warga negaranya terlihat perbeddaan yang sangat mencolok. Semakin jurang pendapatan maka akan semakin besar pula variasi dalam distribusi pendapatan yang akan menyebabkan disparitas pendapatan. Hal tersebut tidak dapat dihindari karena tidak adanya efek perembesan kebawah dari output secara sempurna. Hasil output nasional hanya dinikmati oleh segelintir golongan. (musfidar, 2012). Hal tersebut juga diperkuat oleh teori neoklasik yang menyatakan bahwa perbedaan pendapatan dapat dikurangi melalui proses penyesuaian otomatis “penetesan” hasil pembangunan ke bawah dan kemudian menyebar hingga menimbulkan keseimbangan baru (Todaro dan Smith, 2006). Apabila proses otomatis tersebut masih belum menurunkan ketimpangan maka dapat dilakukan dengan system pajak dan subsidi, penetapan pajak pendapatan akan mengurangi penghasilan penduduk yang tinggi. Sebaliknya subsidi akan membantu penduduk yang pendapatannya rendah, asalkan tidak salah sasaran dalam pengalokasiannya. Pajak yang telah dipungut apalagi menggunakan system tariff progresif oleh pemerintah digunakan untuk membiayai roda pemerintah, subsidi dan proyek pembangunan. Dari

sinilah terjadi proses redistribusi pendapatan yang mengurangi terjadinya ketimpangan (Todaro dan Smith, 2006).

Menurut Anggiat Mugabe Damanik dkk (2018) terdapat 8 Faktor penyebab pendapatan yang tidak Merata (ketimpangan pendapatan). Diantaranya sebagai berikut (1) Pertumbuhan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan menurunnya pendapatan per kapita. (2) Inflasi dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan penambahan produksi barang-barang. (3) Ketidakmerataan pembangunan antar daerah. (4) Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal, sehingga persentase pendapatan modal kerja tambahan besar dibandingkan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran bertambah. (5) Rendahnya mobilitas sosial. (6) Pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis. (7) Memburuknya nilai tukar bagi negara-negara sedang berkemabang dalam perdagangan dengan negara- negara maju, sebagai akibat ketidak elastisan permintaan negara-negara maju terhadap barang-barang ekspor NSB (8) Hancurnya industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain-lain. Selain itu, Menurut saifudin (2014) Ketimpangan pendapatan yang tinggi akan berakibat pada kekakuan sosial, menghambat mobilitas sosial, dan selanjutnya melemahkan kesatuan sosial yang mengancam keberlanjutan perkembangan ekonomi dan keutuhan bangsa.

Indeks ketimpangan pendapatan di Indonesia yang masih berkisar dari angka 0,4 pada tahun 2014-2015 hal tersebut sangat mengkhawatirkan, karena berdasarkan patokan yang mengatagorikan ketimpangan yakni nilai koefisien gini menyatakan bahwa ketimpangan dengan angka 0,4 sampai 0,5 terkatagorikan ketimpangan sedang yang mendekati ketimpangan tinggi. Tabel berikut ini memperlihatkan kriteria ketimpangan distribusi berdasarkan nilai koefisien Gini.

Tabel 1.1 Kriteria Ketimpangan Berdasarkan Nilai Koefisien Gini

Koefisien Gini	Distribusi Pendapatan
.... < 0,4	Ketimpangan Rendah
0,4 < 0,5	Ketimpangan sedang
.... > 0,5	Ketimpangan tinggi

Sumber : BPS 2018

Tabel 1.2 Indeks Gini Indonesia 2014-2016

2014		2015		2016	
Semester 1 (Maret)	Semester 2 (September)	Semester 1 (Maret)	Semester 2 (September)	Semester 1 (Maret)	Semester 2 (September)
0.406	0.414	0.408	0.402	0.397	0.394

Sumber : BPS 2018

Berdasarkan data diatas, indeks gini Indonesia telah mencapai tingkat 0,4 pada tahun 2014 sampai tahun 2015. Peningkatan ketimpangan pendapatan di Indonesia merupakan masalah serius dan cukup mengkhawatirkan sehingga perlu untuk ditangani. Ketimpangan pendapatan yang semakin tinggi memiliki dampak

sosial ekonomi yang cukup serius. Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa banyak dampak-dampak yang ditimbulkan dari ketimpangan pendapatan. Makin tinggi derajat ketimpangan, maka potensi konflik sosial ekonomi akan makin besar. Untuk lebih jelas. Berikut adalah data indeks gini provinsi di Indonesia yang memiliki ketimpangan pendapatan tertinggi dan terendah. Disajikan dengan tabel yang berisi 5 provinsi di Indonesia dengan ketimpangan pendapatan terendah dan 5 provinsi di Indonesia dengan ketimpangan pendapatan tertinggi.

Tabel 1.3 Provinsi di Indonesia dengan Ketimpangan Terendah

Provinsi	2014		2015		2016	
	Semester 1 (Maret)	Semester 2 (September)	Semester 1 (Maret)	Semester 2 (September)	Semester 1 (Maret)	Semester 2 (September)
KEP. BANGKA BELITUNG	0.303	0.295	0.283	0.275	0.275	0.288
KALIMANTAN UTARA	-	-	0.294	0.314	0.3	0.305
SUMATERA UTARA	0.321	0.31	0.336	0.326	0.319	0.312
MALUKU UTARA	0.325	0.322	0.28	0.286	0.286	0.309
SUMATERA BARAT	0.334	0.332	0.342	0.319	0.331	0.312

Sumber : BPS 2018

Tabel 1.4 Provinsi di Indonesia dengan Ketimpangan Tertinggi

Provinsi	2014		2015		2016	
	Semester 1 Maret	Semester 2 September	Semester 1 Maret	Semester 2 September	Semester 1 Maret	Semester 2 September
DKI JAKARTA	0.431	0.436	0.431	0.421	0.411	0.397
YOGYAKARTA	0.419	0.435	0.433	0.42	0.42	0.425
JAWA BARAT	0.413	0.398	0.415	0.426	0.413	0.402
SULAWESI SELATAN	0.425	0.448	0.424	0.404	0.426	0.4
GORONTALO	0.412	0.453	0.42	0.401	0.419	0.41

Sumber : BPS 2018

Berdasarkan data diatas kita dapat mengetahui pencapaian ketimpangan melalui indeks gini per provinsi di Indonesia yang memiliki ketimpangan yang rendah dan ketimpangan yang tinggi. Ternyata tidak sedikit provinsi yang memiliki tingkat ketimpangan yang besar. Terdapat beberapa provinsi yang menunjukkan ketimpangan yang cukup mencemaskan karena memiliki angka ketimpangan yang melebihi 0,4 yakni seperti DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan Gorontalo.

Menurut Anneli (2005) Ketimpangan pendapatan yang terjadi dapat diakibatkan oleh tingginya angka pengangguran, korupsi, inflasi, bencana alam, perkembangan teknologi, dan ketimpangan pendidikan. Selain itu ketimpangan pendapatan juga dipengaruhi oleh ketimpangan alokasi kredit pada usaha-usaha

UMKM. Peningkatan kualitas pendidikan merupakan langkah awal dari sebuah perencanaan yang matang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Investasi di bidang pendidikan telah terbukti mampu meningkatkan taraf hidup manusia. Hakikat pembangunan ekonomi itu sendiri adalah untuk mensejahterahkan dan memakmurkan masyarakat lemah. Masyarakat tidak akan produksi jika pendidikannya rendah, untuk itu perlu perencanaan yang terstruktur dan matang dalam rangka menjadikan suatu Negara yang masyarakatnya sejahtera, adil dan makmur (Dedi Saputra dkk, 2015).

Pendidikan merupakan faktor penting yang mempengaruhi perkembangan suatu Negara baik dibidang ekonomi, politik, sosial, budaya maupun hokum. Tingkat dan kualitas pendidikan sangat menentukan arah pertumbuhan semua bangsa termasuk bangsa Indonesia. Namun, pada kenyataanya dapat kita lihat bahwa sampai saat ini masih banyak rakyat Indonesia yang belum mendapatkan haknya mengeyam bangku pendidikan dasar, apalagi akases perguruan tinggi. Hal ini terlihat dari jumlah penduduk Indonesia yang tidak/belum sekolah sebesar 39.123 jiwa untuk sekolah dasar, 38.702 jiwa untuk sekolah menengah pertama dan 36.419 jiwa untuk sekolah menengah atas. Jika ditotalkan berarti terdapat 114.244 jiwa penduduk Indonesia putus sekolah dari 258,7 juta jiwa jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2016 (BPS-RI, 2016). Belum lagi ketimpangan antar daerah yang terjadi di Indonesia. Daerah-daerah terbelakang dan belum mendapatkan akses infrastruktur dasar masih tersebar di berbagai pelosok daerah. Tentunya hal ini menyulitkan untuk mewujudkan tujuan pemerataan pendidikan yang telah menjadi sebuah komitmen negara sebagaimana

tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam usaha untuk peningkatan pendidikan di suatu negara maka pemerataan pendidikan harus benar-benar diutamakan sehingga tidak terjadi ketimpangan pendidikan antara masyarakat.

Permasalahan ketimpangan pendidikan akan mempengaruhi ketimpangan pendapatan provinsi di Indonesia. Beberapa hasil studi yang telah melakukan penelitian mengenai hubungan antara ketimpangan pendidikan dan ketimpangan pendapatan, diantaranya adalah berdasarkan hasil penelitian Sri Indah Nikensari (2016) mengenai Gap Alokasi Sumber Daya, Efektifitas Partnership Budget Policy dan Ketimpangan Pendapatan dengan menggunakan data di 33 provinsi pada tahun 2007-2013. Selain itu juga berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Saifuddin (2014) mengenai Pengaruh Ketimpangan Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan dengan menggunakan data di provinsi Jawa Barat pada tahun 2008-2012. Keduanya menyatakan dan membuktikan bahwa ketimpangan pendidikan berkorelasi positif dengan ketimpangan pendapatan.

Selain ketimpangan pendidikan, ketimpangan pendapatan juga dipengaruhi oleh ketimpangan alokasi kredit. Berdasarkan “credit suisse’s global wealth report 2016” Indonesia merupakan Negara yang memiliki ketimpangan yang tinggi menduduki peringkat ke 4 di dunia setelah Rusia, India, & Thailand. Kondisi ini disebabkan oleh timpangnya penguasaan kekayaan dalam masyarakat, dimana 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 49,3% kekayaan nasional.

Menurut gubernur Bank Indonesia, dengan memperbesar porsi kredit ke sektor usaha kecil dan menengah (UMKM) merupakan cara Bank Indonesia dalam membantu pemerintah untuk membantu memangkas ketimpangan. Diungkapkan bahwa sesuai peraturan BI No 14122/BP/2012 pemberian kredit terhadap UMKM wajib minimal 20% dari total portopolio kredit perbankan, namun realisasi porsi kredit umkm baru mencapai 19% dari total penyaluran kredit atau sekitar 7,2% dari pendapatan domestic bruto. Hal tersebut dikarenakan fokus bank masih pada kredit konsumsi bukan pada kredit modal kerja/usaha dan investasi. Permasalahan ketimpangan alokasi kredit akan mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Indonesia. Hasil studi yang telah melakukan penelitian mengenai hubungan antara ketimpangan alokasi kredit usaha terhadap ketimpangan pendapatan adalah berdasarkan hasil penelitian Sri Indah Nikensari (2016) mengenai Gap Alokasi Sumber Daya, Efektifitas Partnership Budget Policy dan Ketimpangan Pendapatan dengan menggunakan data di 33 provinsi pada tahun 2007-2013. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh ketimpangan pendidikan dan ketimpangan alokasi modal terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia tahun 2014-2016. Serta berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Liu Xiaoxuan mengenai the Financial Resources allocated to Real Economy in China tahun 2000-2007. Keduanya menyatakan dan membuktikan bahwa ketimpangan alokasi kredit berkorelasi positif dengan ketimpangan pendapatan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh antara ketimpangan pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia
2. Terdapat pengaruh antara ketimpangan alokasi kredit terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia
3. Terdapat pengaruh ketimpangan pendidikan dan ketimpangan alokasi kredit secara bersama-sama (simultan) terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia

C. Tujuan & Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah-masalah yang telah peneliti rumuskan diatas penelitian ini adalah untuk mendapatkan pengetahuan yang tepat dan dipercaya tentang :

1. Menghitung ketimpangan pendidikan dari tahun 2014 sampai tahun 2016.
2. Menghitung ketimpangan alokasi kredit dari tahun 2014 sampai tahun 2016.
3. Menganalisis pengaruh ketimpangan pendidikan dan ketimpangan alokasi kredit terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini juga dapat digunakan untuk :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi dalam bidang ekonomi khususnya tentang pengaruh ketimpangan pendidikan dan alokasi kredit terhadap ketimpangan pendapatan.

2. Manfaat Praktis

Memberikan masukan dan solusi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pendidikan dan permodalan, dalam hal pemecahan masalah ketimpangan pendapatan yang terjadi di Indonesia serta untuk menetapkan strategi yang tepat dalam mengatasi permasalahan ketimpangan.